

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



DINAS TENAGA KERJA

2023

LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu-isu Strategis	4
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS TENAGA KERJA	20
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	22
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	35
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	37
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	39
3.4 Akuntabilitas Keuangan	40
3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	41
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.7 Prestasi dan Penghargaan	43
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2023	xi
Tabel 2	Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai	xi
Tabel 3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023	xii
Tabel 4	Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	xii
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 ...	xiii
Tabel 6	Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023	xiv
Tabel I. 1	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
Tabel I. 2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel II. 1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	14
Tabel II. 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	15
Tabel II. 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai ...	17
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	17
Tabel II. 5	Program kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	18
Tabel II. 6	Program kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	19
Tabel III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III. 2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	22
Tabel III. 3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	23
Tabel III. 4	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	35
Tabel III. 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	38
Tabel III. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	40
Tabel III. 7	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	41
Tabel III. 8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	41
Tabel III. 9	Prestasi dan Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai	4
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai	7
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai	8
Gambar II. 1	Misi ke - 1 Kota Dumai	12
Gambar III. 1	Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Ta. 2023	25
Gambar III. 2	Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Membuat Sabun Ta. 2023	30
Gambar III. 3	Dokumentasi Kegiatan Hubungan Industrial Ta. 2023	33

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Tenaga Kerja Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Tenaga Kerja.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 19 Januari 2024

KEPALA

DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770524 199602 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2022 Nomor 1 Seri D) dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, maka sebagai unsur teknis, Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Tenaga

Kerja Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”** dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan terciptanya situasi kerja yang kondusif”**.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

III. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

V. Program Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja.	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%
		Persentase penempatan tenaga kerja	10%
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.646.997.842 (*Enam milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 80.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 626.569.300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 240.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 486.680.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.213.748.142	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.646.997.842	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 80.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 626.569.300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 240.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 503.480.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.243.748.142	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.693.797.842	

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 %	4,36 %	29,6 %	-	-	-	V

	sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	10 %	41,75 %	141,8 %	V	-	-	-
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30 %	80,95 %	269,83 %	V	-	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten /Kota	100 %	100 %	100 %	V	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.693.797.842,- (*Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 6.495.021.942,- (*Enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 198.775.900,- (*Seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	6.495.021.942,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	198.775.900,-
	J u m l a h	:	Rp.	6.693.797.842,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja							
Sasaran: Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10%	4,36%	29,60%			
Program: Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10%			Rp626.569.300	Rp601.632.910	96,02%
	Persentase penempatan tenaga kerja	15%	41,75%	141,80%			
Program: Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	30%			Rp240.000.000	Rp236.376.308	98,49%
Sasaran: Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%	80,95%	269,83%			
Program: Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	85%			Rp503.480.400	Rp489.470.372	97,22%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	29,60	96,02	0,31	Kurang Efisien	-
		Persentase penempatan tenaga kerja	141,80	98,49	1,44	Efisien	-
		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	69,83	97,22	0,72	Kurang Efisien	-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan* persentase tingkat efisiensinya adalah 0,31 yang berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (29,60%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,02%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;

2. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase penempatan tenaga kerja* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,44 yang berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (141,80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,49%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
3. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan* persentase tingkat efisiensinya adalah 0,72 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (69,83%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah,

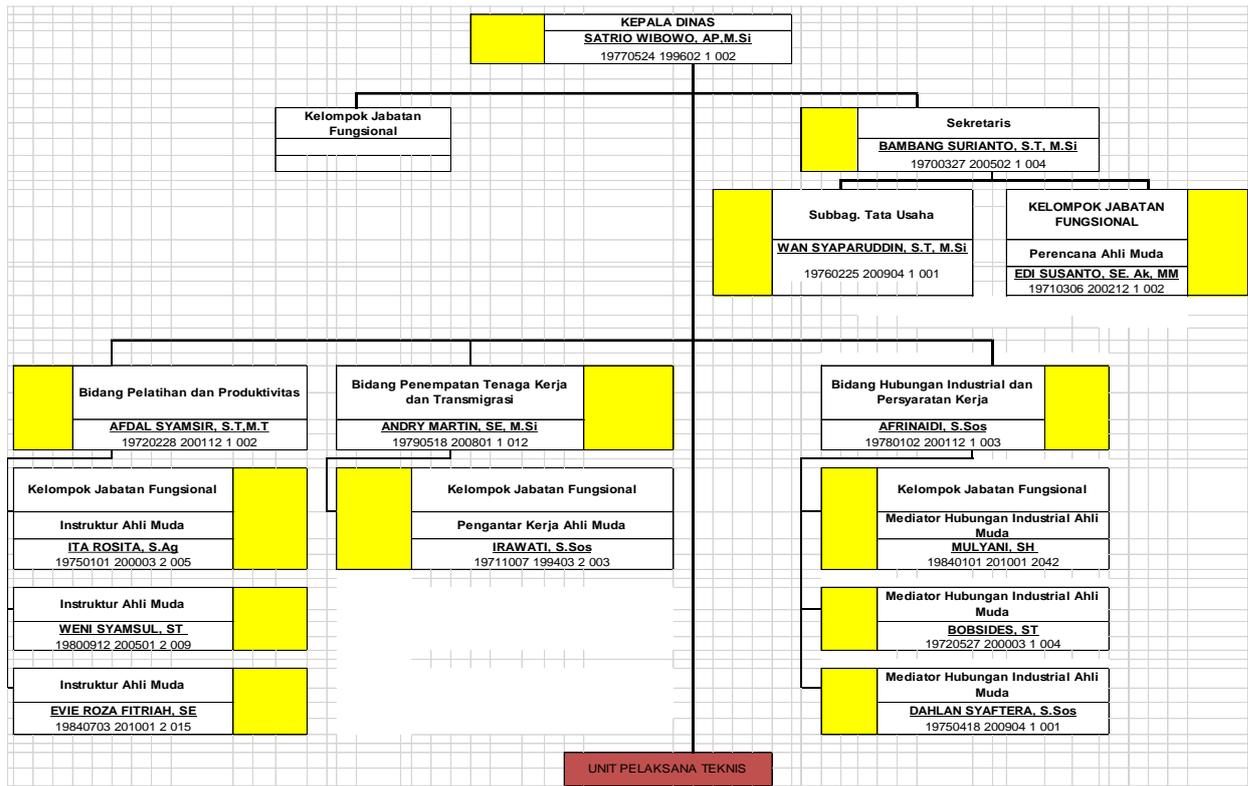
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Gambar I. 1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya.

Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang perlu ditangani sbb:

1. Tingginya Angka Pengangguran

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, dimana peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Rumah Terampil - Latihan Kerja yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai pendidikan maksimal tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan

tinggi merupakan bagian terkecil dari seluruh angkatan kerja. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yaitu dengan menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja. Pasar kerja mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensinya melalui berbagai keterampilan dibalai/lembaga pelatihan kerja dan dengan demikian diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

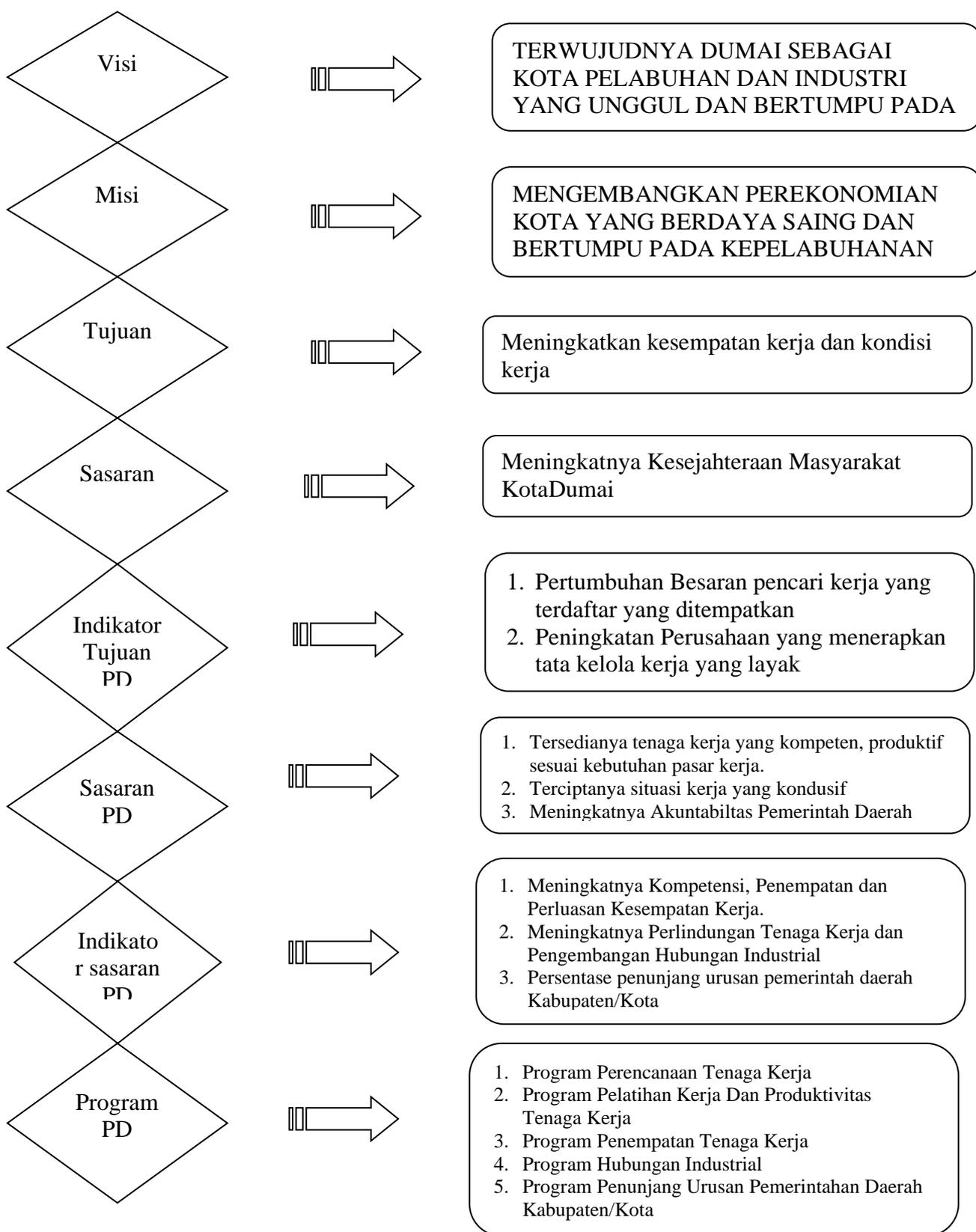
Maraknya unjuk rasa pekerja diantaranya disebabkan masih lemahnya lembaga hubungan industrial. Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi Isu Strategis untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan upah yang layak dan berkeadilan diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 2

Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3

Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

PROSES BISNIS/TUJUAN		PROSES BISNIS / SASARAN		SUB PROSES BISNIS / STRATEGI		Peta Lintas Fungsi / ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3		4	
Kode	PROSES UTAMA	Kode	PROSES UTAMA	Kode	PROSES UTAMA	Kode	PROSES UTAMA
DTK 01	Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	DTK 01	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	DTK 01.01	Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	DTK 01.01.01	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
						DTK 01.01.02	Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
						DTK 01.01.03	Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai
						DTK 01.01.04	Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai
				DTK 01.02	Meningkatkan peluang kerja sektor informal bagi wirausaha	DTK 01.02.01	Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap banyak tenaga kerja/wirausaha
		DTK 02	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	DTK 02.01	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan	DTK 02.02.01	Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
						DTK 02.02.02	Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
						DTK 02.02.03	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1313.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I. 1

Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Didalam Perencanaan kinerja belum dilampirkan eviden yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan Perencanaan kinerja dalam eviden yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi
2.	Belum adanya SOP pengumpulan data kinerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan SOP pengumpulan data kinerja
3.	Didalam monev Realisasi Fisik dan Keuangan belum dilampirkan nota dinas, foto, dan notulen.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan Rapat monev Realisasi Fisik dan Keuangan (nota dinas, foto, dan notulen)
4.	Didalam monev Realisasi Fisik dan Keuangan belum dilampirkan SPT, foto, dan laporan kegiatan.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan SPT, foto, dan laporan kegiatan)
5.	Belum dilampirkannya Dokumen tabel monev Realisasi Fisik dan Keuangan	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan Dokumen tabel monev Realisasi Fisik dan Keuangan
6.	Belum dilampirkannya eviden tentang Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai diharapkan melampirkan eviden tentang Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I. 2

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan Perencanaan kinerja dalam eviden yang dapat memeberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi	12 Bulan
2.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan SOP pengumpulan data kinerja	12 Bulan
3.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan Rapat monev Realisasi Fisik dan Keuangan (nota dinas, foto dan notulen)	12 Bulan
4.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan SPT, foto, dan laporan kegiatan)	12 Bulan
5.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan Dokumen tabel monev Realisasi Fisik dan Keuangan	12 Bulan
6.	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai akan melampirkan eviden tentang Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	12 Bulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerjatahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

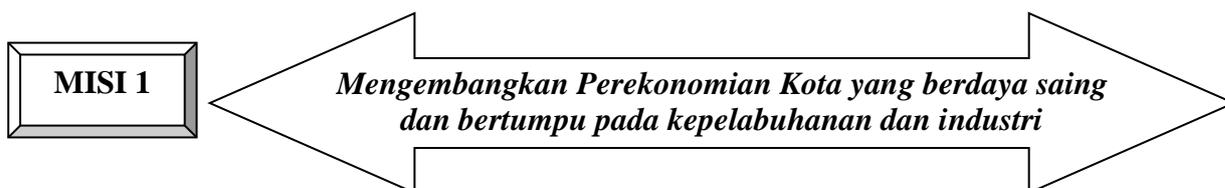
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II. 1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	10 %		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	10 %
	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10 %		Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10 %
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 %	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 %
	Persentase penempatan tenaga kerja	10 %		Persentase penempatan tenaga kerja	10 %
	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30 %	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30 %
	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2

Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai
			Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai
			Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang

			menyerap banyak tenaga kerja/wirausaha
	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan	Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
			Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
			Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja.	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 %
		Persentase penempatan tenaga kerja	10 %
2.	Terciptanya situasi kerja	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial	30 %

	yang kondusif	antara pekerja dengan perusahaan	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.646.997.842,- (*Enam milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain:

Tabel II. 5
Program kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 80.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 626.569.300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 240.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 486.680.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.213.748.142	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.646.997.842	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Program kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 80.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 626.569.300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 240.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 503.480.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.243.748.142	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.693.797.842	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III. 2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai telah menetapkan 3 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table 6 dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III. 3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10,6 %	70,7 %	15 %	4,36 %	29,6 %	Tidak Berhasil
		Persentase penempatan tenaga kerja	12,64 %	126,4 %	10 %	41,75 %	141,8 %	Sangat Berhasil
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	176,47 %	305,88 %	30 %	80,95 %	269,83 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 15% realisasi sebesar 4,36%, tercapai 29,6% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 10,6% atau tercapai sebesar 70,7%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 41,1%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya kebijakan yang mendukung pelatihan dan pengembangan tenaga kerja;
 - Ketersediaan instruktur atau pelatih yang berkualitas;

- Infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai;
 - Analisis kebutuhan pelatihan yang baik untuk menentukan jenis pelatihan yang diperlukan;
 - Hubungan baik dengan industri terkait untuk mendukung program pelatihan; dan
 - Penyesuaian program pelatihan dengan perkembangan industri dan teknologi terbaru;
 - Adanya kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah sebagai berikut:
- Kurangnya alokasi anggaran untuk program pelatihan dapat menjadi hambatan utama; dan
 - Kekurangan sarana dan prasarana akan menghambat strategi yang telah direncanakan.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah sebagai berikut:
- Identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan berdasarkan evaluasi hasil dan pengusulan penambahan anggaran untuk penambahan fasilitas pelatihan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang pelatihan.

Gambar III. 1
DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN
BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI TA. 2023



PELATIHAN MONTIR SEPEDA MOTOR



PELATIHAN ROPE ACCES



PELATIHAN OPERATOR BOILER





PELATIHAN BAKERY



PENUTUPAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI TA. 2023



PELATIHAN LAS LISTRIK PROGRAM CSR PATRA SK TA. 2023



2. Indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator persentase penempatan tenaga kerja menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 10% realisasi sebesar 41,75%, tercapai 141,8% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 12,64% atau tercapai sebesar 126,4%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 15,4%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** persentase penempatan tenaga kerja kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya permintaan tinggi dari pasar tenaga kerja untuk keterampilan atau pekerjaan tertentu dapat mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja;
 - Peningkatan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan persentase penempatan;
 - Kerjasama yang baik antara lembaga penyedia tenaga kerja dengan industri dapat meningkatkan peluang penempatan.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** persentase penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya permintaan atau kelebihan penawaran tenaga kerja dalam suatu sektor dapat menyulitkan mencapai target penempatan;
 - Kurangnya kualifikasi atau keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar dapat menghambat capaian target;
 - Ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan lulusan atau tenaga kerja yang tersedia dapat menjadi hambatan.
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** persentase penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- Perhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pastikan program pendidikan dan pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar;
- Perlu peningkatan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja dan optimalisasi peran pengantar kerja.

Gambar III. 2

DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN MEMBUAT SABUN TA. 2023



3. Indikator persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 30% realisasi sebesar 80,95%, tercapai 269,83% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 176,47% atau tercapai sebesar 305,88%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 36,05%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Pada perencanaan Analisa jenis sosialisasi yang kurang akurat dan peserta sosialisasi masih ada yang belum sepenuhnya berpartisipasi;
 - Pelanggaran terhadap kebijakan atau regulasi yang mengatur HI dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik;
 - Masih adanya hubungan industrial yang kurang harmonis di perusahaan (antara pengusaha dan pekerja) serta masih adanya perusahaan yang belum menerapkan aturan norma ketenagakerjaan;
 - Laporan tidak berdasarkan data valid yang perusahaan berikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja adalah sebagai berikut:
 - Kurang survei dalam melihat kondisi hubungan industrial sehingga sosialisasi yang dilaksanakan kurang tepat sasaran;

- Ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi dan terjadinya kasus hubungan industrial;
 - Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja serta kasus hubungan industrial yang masih tinggi;
 - Tidak mengikuti standar pelaporan dan laporan tidak bisa dijadikan untuk evaluasi kedepannya.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja adalah sebagai berikut:
- Lakukan analisis mendalam terhadap data perselisihan hubungan industrial untuk memahami penyebab utama dan tren yang mungkin telah berkontribusi pada penurunan tersebut;
 - Masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya kontrak kerja antara pencari kerja dan pemberi kerja sehingga munculnya kasus Hubungan Industrial dan di selesaikan oleh Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang dapat menyelesaikan penyelesaian kasus perselisihan yang ada.

Gambar III. 3

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN



KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (MEDIASI)



KEGIATAN RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA DUMAI TA. 2023



3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	15%	10,6%	4,36%	70,7%	29,6%
		Persentase penempatan tenaga kerja	10%	10%	12,64%	41,75%	126,4%	141,8%
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	25%	30%	76,47%	80,95%	305,88 %	69,83%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Indikator pertama adalah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dengan target pada Tahun 2022 adalah 15% berasal dari perhitungan jumlah peserta pelatihan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2022 jumlah peserta pelatihan sebanyak 278 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 70 orang, pelatihan MTU (Mobile Training Unit) sebanyak 12 paket dengan peserta 16 orang per paket pelatihan jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 192 orang, dan pelatihan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) sebanyak 16 orang dari 2.627

Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2022 adalah 10,6% dengan capaian 70,7%. Pada Tahun 2023 jumlah peserta pelatihan sebanyak 80 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 64 orang dan pelatihan dengan anggaran mitra Disnaker sebanyak 16 orang dari 1.832 Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2022 adalah 4,36% dengan capaian 29,6%.

- 1b. Pada Tahun 2022 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 332 Orang dari 2.627 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada tahun 2022 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 12,64% dengan capaian 126,4%. Pada Tahun 2023 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 765 Orang dari 1.832 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada Tahun 2023 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 41,75% dengan capaian 141,8%.
- 1c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap realisasinya dapat dilihat ditabel 12. Untuk indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan capaian kinerja hanya tercapai untuk tahun 2023 sebesar 4,36% permasalahannya, yaitu kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan sehingga peserta yang dilatih disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Pada Tahun 2022 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 17 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 13 kasus atau 76,47 %. Sementara untuk tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 kasus Perselisihan Hubungan Industrial

sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus atau 80,95 %.

- 2b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap kecuali untuk Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan naik menjadi 30% dari sebelumnya yaitu 25% dan realisasinya dapat dilihat ditabel III.4.
- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Target Tahun 2022 Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah 100%, capaian di Tahun 2023 capaian adalah 100% atau sebesar 100%.
- 3b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap realisasinya dapat dilihat ditabel 12.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan (TIDAK/CUKUP/ BERHASIL/SANGAT) BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	4,36%	29,07%
		Persentase penempatan tenaga kerja	10%	41,75%	417,5%
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%	80,95%	269,83%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebagai berikut:
 - Identifikasi kebutuhan pelatihan: Lakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk memahami area di mana tenaga kerja memerlukan pengembangan keterampilan;
 - Komunikasikan manfaat pelatihan: Informasikan tenaga kerja mengenai manfaat dan dampak positif yang dapat diperoleh dari mengikuti pelatihan;
 - Jalin kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal: Manfaatkan keahlian lembaga pelatihan eksternal untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

- Ikuti tren industri: Pastikan program pelatihan mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam industri sehingga karyawan dapat mengembangkan keterampilan yang relevan.
2. Capaian Indikator Persentase penempatan tenaga kerja sebagai berikut:
- Mengumpulkan data terkait jumlah calon tenaga kerja yang telah mendaftar atau mengikuti proses seleksi;
 - Jalin kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan peluang magang bagi siswa atau peserta pelatihan;
 - Identifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi persentase penempatan, seperti perubahan dalam kebijakan rekrutmen atau kondisi pasar tenaga kerja;
 - Sesuaikan strategi berdasarkan perubahan kondisi pasar tenaga kerja atau kebijakan perusahaan.
3. Capaian Indikator Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan sebagai berikut:
- Lakukan audit awal untuk menentukan tingkat perselisihan hubungan industrial saat ini. Ini akan menjadi baseline untuk mengukur penurunan angka perselisihan;
 - Dukung unit SDM untuk memastikan kebijakan dan prosedur yang mendukung hubungan industrial yang baik;
 - Implementasikan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi dan hasil survei, lakukan pemantauan terus-menerus dan koreksi kebijakan atau program yang diperlukan;
 - Jika diperlukan, pertimbangkan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang rumit.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III. 6 berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	4,36%	-	Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase penempatan tenaga kerja	41,75%	-	
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	80,95%	-	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	-	

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp6.693.797.842,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)* bersumber dari APBD Kota Dumai Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar *Rp.6.495.021.942,- (Enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)* dan *BELANJA MODAL* sebesar *Rp.198.775.900,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).*

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp6.370.429.210,- (Enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah),* terdiri dari Belanja Operasi *Rp6.182.457.410,- (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah)* dan Belanja Modal

terrealisasi Rp187.971.800,- (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III. 7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1.		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 80.000.000	Rp 76.210.000	95,26%	0,96%
2.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 626.569.300	Rp 601.632.910	96,02%	0,96%
3.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 240.000.000	Rp 236.376.308	98,49%	0,96%
4.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 503.480.400	Rp 489.470.372	97,22%	0,96%

Total anggaran belanja adalah Rp6.693.797.842,- dengan realisasi Rp6.370.429.210,- atau dengan capaian sebesar 95,17% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Tingginya harga yang direncanakan dibandingkan harga pasar;
2. Ada beberapa mata anggaran belanja didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tidak jadi digunakan;

3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja							
Sasaran: Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10%	4,36%	29,60%			
Program: Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10%			Rp626.569.300	Rp601.632.910	96,02%
	Persentase penempatan tenaga kerja	15%	41,75%	141,80%			
Program: Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	30%			Rp240.000.000	Rp236.376.308	98,49%
Sasaran: Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%	80,95%	269,83%			
Program: Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	85%			Rp503.480.400	Rp489.470.372	97,22%

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan* yaitu 80 orang tingkat efisiensinya adalah 30,83% berasal dari perhitungan persentase

capaian kinerja tahun 2023 (29,60%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,02%).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;

- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase penempatan tenaga kerja* yaitu Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 765 Orang dari 1.832 Orang yang terdaftar tingkat efisiensinya adalah 143,97% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (141,80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,49%).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan* yaitu kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus tingkat efisiensinya adalah 277,54% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (269,83%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

3.7 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 9
Prestasi dan Penghargaan Dinas
Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP Intemal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	PERINGKAT KETIGA Pada Kluster Pendukung	Kota Dumai	Wali Kota Dumai

BAB IV

PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 19 Januari 2024

KEPALA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770524 199602 1 002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
SASARAN 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	Pertumbuhan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / jumlah pencari yang terdaftar x 100%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencaker yang dilatih / jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	-	-	0%	10%	10%	10%	10%	1	Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	21
																					Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai	Program Penempatan Tenaga Kerja		
																					Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
																					Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai	Program Penempatan Tenaga Kerja		
																					Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap banyak tenaga kerja/wirasaha	Program Penempatan Tenaga Kerja		
	Peningkatan Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan yang memiliki PB / jumlah perusahaan yang terdaftar x 100%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan / jumlah kasus yang terdaftar x 100%	-	-	20%	20%	20%	20%	20%		Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan	Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	

																				Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial		
																					Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	

Dumai, 19 Januari 2024



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI

SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100%	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	80.000.000
Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	580.000.000
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	10.000.000
						Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	36.569.300
	Persentase penempatan tenaga kerja	10%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	30%	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	450 Orang	30.000.000
						Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	70.000.000
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			

						Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	125.000.000
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	15.000.000
	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	30%	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	85%	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagiPerusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PeraturanPerusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial danTerdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	30.000.000
						Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	10.000.000
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	130.216.400
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	55 Perkara	22.399.000

						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	18.985.000
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya Pembinaan dan Kelengkapan Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh	1 Dokumen	13.080.000
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5.500 Orang	278.800.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.128.400
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	8.218.400
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.630.240.142
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.979.408
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.975.000
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.005.752
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.377.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.910.400
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.058.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.208.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.173.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.850.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	133.320.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	693.117.640
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	139.210.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	36.150.000

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	107.827.000
J U M L A H									6.693.797.842

Dumai, 19 Januari 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS



Pihak Pertama,

SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja.	Persentase Besarannya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	15
		Persentase penempatan tenaga kerja	%	10
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	30

1 Sasaran 1

1 Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp. 626.569.300

Program Penempatan Tenaga Kerja

Rp. 240.000.000

2 Sasaran 2

Terciptanya situasi kerja yang kondusif

Program Hubungan Industrial

Rp. 234.680.400

JUMLAH

Rp. 1.101.249.700

Dumai, Januari 2023





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



PIHAK PERTAMA

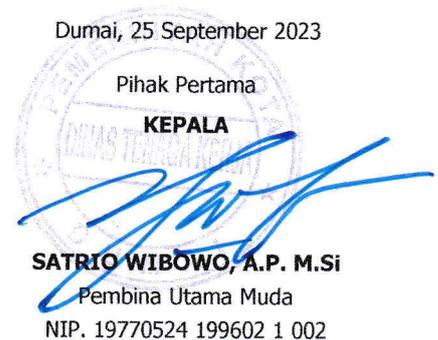
SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran StrategiS	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja.	Persentase Besarannya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	15
		Persentase penempatan tenaga kerja	%	10
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	30

Sasaran 1	:	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 626.569.300
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 240.000.000
Sasaran 2	:	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Program Hubungan Industrial	Rp. 486.680.400
			Jumlah	Rp. 1.353.249.700



PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang dilatih} \times 100\%}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang terdaftar}}$	15%	4,36%	29,60%
		Persentase penempatan tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan} \times 100\%}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}}$	10%	41,75%	141,80%
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	$\frac{\text{Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}}$	30%	80,95%	269,83%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 6.693.797.842
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 6.370.429.210
 Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 95,17%

Dumai, 19 Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770524 199602 1 002

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.243.748.142	Rp 4.966.739.620	94,72%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 23.346.800	Rp 15.828.000	67,80%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 15.128.400	Rp 8.313.000	54,95%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.218.400	Rp 7.515.000	91,44%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.639.219.550	Rp 3.387.957.330	93,18%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.630.240.142	Rp 3.379.590.180	93,10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8.979.408	Rp 8.367.150	93,18%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 280.326.152	Rp 277.133.464	98,86%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.975.000	Rp 9.934.400	99,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 80.005.752	Rp 79.877.251	99,84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 24.377.000	Rp 24.335.500	99,83%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5.910.400	Rp 3.069.000	51,93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 160.058.000	Rp 159.917.313	99,91%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 185.381.000	Rp 180.253.000	97,23%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 125.208.000	Rp 125.160.000	99,96%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.173.000	Rp 55.093.000	91,56%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 832.287.640	Rp 822.847.826	98,87%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.850.000	Rp 5.850.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 133.320.000	Rp 127.538.886	95,66%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 693.117.640	Rp 689.458.940	99,47%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 283.187.000	Rp 282.720.000	99,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 139.210.000	Rp 139.195.000	99,99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.150.000	Rp 35.715.000	98,80%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 107.827.000	Rp 107.810.000	99,98%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 80.000.000	Rp 76.210.000	95,26%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp 80.000.000	Rp 76.210.000	95,26%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp 80.000.000	Rp 76.210.000	95,26%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 626.569.300	Rp 601.632.910	96,02%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 580.000.000	Rp 556.483.510	95,95%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 580.000.000	Rp 556.483.510	95,95%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp 36.569.300	Rp 35.149.400	96,12%
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp 36.569.300	Rp 35.149.400	96,12%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 240.000.000	Rp 236.376.308	98,49%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 99.213.750	99,21%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00%
Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 70.000.000	Rp 69.213.750	98,88%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 125.000.000	Rp 122.533.636	98,03%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Rp 125.000.000	Rp 122.533.636	98,03%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 14.628.922	97,53%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 15.000.000	Rp 14.628.922	97,53%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 503.480.400	Rp 489.470.372	97,22%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 170.216.400	Rp 169.687.400	99,69%

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp 30.000.000	Rp 29.744.000	99,15%
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 130.216.400	Rp 129.943.400	99,79%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 333.264.000	Rp 319.782.972	95,95%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 22.399.000	Rp 17.176.980	76,69%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.985.000	Rp 18.974.000	99,94%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp 13.080.000	Rp 11.914.392	91,09%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 278.800.000	Rp 271.717.600	97,46%
J U M L A H	Rp 6.693.797.842	Rp 6.370.429.210	95,17%

Dumai, 19 Januari 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2023





BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Piagam Penghargaan

PERINGKAT KETIGA
Pada Kluster Pendukung



Implementasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023

Diberikan Kepada :

Dinas Tenaga Kerja

Dumai, 24 November 2023

Wali Kota Dumai,



H. PAISAL, SKM, MARS



MENUJU INSPEKTOR YANG **SIGAP**